

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya pengertian pendidikan menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, adalah:

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (pasal 1).

Dirumuskan pula sebagai “proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosi kearah alam dan semesta manusia” (Dewey dalam Hasbullah, 2001: 2), atau proses memberi bekal yang tidak dibutuhkan pada masa kanak-kanak, akan tetapi dibutuhkannya pada waktu dewasa. Secara lebih mendasar dirumuskan sebagai “pemanusiaan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf insani” (Driyarkara dalam Hasbullah, 2001: 2). Secara lebih lengkap dirumuskan sebagai:

“Tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya” (Dewantara dalam Hasbullah, 2001: 4).

Dengan demikian pendidikan adalah usaha sadar untuk mengantarkan peserta didik kearah kesempurnaannya. Pendidikan memiliki urgensi yang sangat besar bagi kehidupan seseorang secara pribadi maupun sosial.

Tujuan pendidikan merupakan gambaran dari falsafah atau pandangan hidup manusia, baik secara perseorangan maupun kelompok (Sadulloh, 2006: 58), secara resmi tujuan pendidikan nasional ialah:

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No.20 Tahun 2003 Pasal 3).

Rumusan tujuan pendidikan tersebut mengandung nilai *autonomi*, *equity*, dan *survival* (Sadulloh, 2006:59). *Autonomi* berarti memberi kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan secara maksimal kepada individu maupun kelompok, untuk dapat hidup mandiri, dan hidup bersama dalam kehidupan yang lebih baik. *Equity* (keadilan) berarti tujuan pendidikan harus memberi kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk hidup berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya dan kehidupan ekonomi dengan pendidikan dengan memberi pendidikan dasar yang sama. Sedangkan *survival* maksudnya dengan pendidikan akan menjamin pewarisan kebudayaan dari satu generasi kegenerasi berikutnya (Sadulloh, 2006: 59). Nilai-nilai dari tujuan pendidikan berarti tujuan pendidikan untuk mencerdaskan manusia sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya serta dapat mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan ajaran agama. Dengan

demikian tujuan pendidikan menjadi hal yang diutamakan agar setiap individu dapat menghormati, mentaati dan menghargai individu lainnya.

Lebih dari itu, dari mulai *equity* atau keadilan dalam tujuan pendidikan tersebut yang memberi kesempatan yang sama pada seluruh warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan, maka pendidikan tidak membeda-membedakan manusia dalam berpartisipasi dan mengembangkan dirinya. Ini berarti memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang disebut kesetaraan gender.

Kesetaraan gender dalam proses pembelajaran memerlukan keterlibatan Depdiknas sebagai pengambil kebijakan di bidang pendidikan, sekolah secara kelembagaan dan terutama guru. Dalam hal ini di perlukan standarisasi buku ajar yang salah satu kriterianya adalah berwawasan gender. selain itu guru akan menjadi agen perubahan yang sangat menentukan bagi terciptanya kesetaraan gender dalam pendidikan melalui proses pembelajaran yang peka gender (Suciati, 2005).

Gender yang merupakan pemilihan peran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial merupakan bagian dari budaya. Gender secara leksikon merupakan identitas atau penggolongan gramatikal yang berfungsi mengklasifikasi suatu benda pada kelompok-kelompoknya. Penggolongan ini secara garis besar berhubungan dengan kategori feminim dan maskulin. Secara terminologi, gender digunakan untuk menandai perbedaan segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat dengan perbedaan seksual (Illich dalam Munthali'in, 2001). Perbedaan yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah bahasa, tingkah

laku, pikiran makanan, ruang, waktu, harta milik, tabu, teknologi, media massa, mode, pendidikan, profesi, alat-alat produksi, dan alat rumah tangga (Dzuhayatin dalam Munthali'in, 2001). Gender dirumuskan pula sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan, yang dikonstruksi secara sosial sehingga dapat berubah dari waktu ke waktu. Usaha untuk membagi manusia menjadi dua golongan, laki-laki dan perempuan, dan usaha untuk membedakan keduanya dalam posisi dan peranan sosial yang berbeda merupakan suatu tindakan yang direncanakan (Budiman dalam Munthali'in, 2001). Jadi apa yang disebut dengan kodrat perempuan dalam konteks gender adalah merupakan buatan, yaitu hasil kombinasi antara tekanan dan paksaan di suatu pihak dengan rangsangan yang tidak wajar, sekaligus menyesatkan pihak lain, khususnya perempuan.

Semula perempuan memiliki hak dan kontribusi yang sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi kelompok/rumah tangga. Namun dengan berkembangnya hak milik pribadi, kesetaraan tersebut bergeser. Laki-laki memiliki peluang lebih besar untuk menguasai hak milik pribadi tersebut, karena laki-laki menjadi lebih leluasa meraih dan memilikinya. Dalam kajian sosiologi sering kali terdapat asumsi adanya "*single society*", yang menggambarkan generalisasi pengelompokan mengenai laki-laki dan perempuan, padahal antara laki-laki dan perempuan secara nyata tinggal dalam dunia sosial yang sama. Perlu dicatat bahwa perempuan dan laki-laki yang tinggal dalam satu lokasi fisik yang sama, tetapi mereka dalam dunia yang berbeda (Millman dalam Sihite, 2007: 93-94).

Pelaksanaan pendidikan kesetaraan gender dapat dilakukan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), yang memilih visi dan misi menjunjung tinggi nilai-nilai moral positif. Sementara itu tujuan mata pelajaran PKn tersebut, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 dan No. 23 tahun 2006 Tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah adalah sebagai berikut:

1. Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (pasal 3).

Guru adalah sebagai fasilitator bagi siswa dalam memahami dan menghayati materi pelajaran. Demi menunjang terlaksananya proses pembelajaran, guru perlu alat bantu atau media, salah satunya adalah melalui media film, sebab dalam unsur film terkandung bermacam-macam pesan edukatif yang dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran. Melalui film peserta didik diharapkan mampu mendapatkan pengalaman belajar yang lain dan bisa dijadikan sarana belajar dalam memahami pesan yang terkandung adalah film tersebut. Dengan bantuan media film peserta didik diharapkan bisa melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari, khususnya mengenai ajaran kesetaraan gender yang terkandung dalam film yang berjudul Perempuan Berkalung Sorban.

Film Perempuan Berkalung Sorban garapan Hanung Bramantyo merupakan film yang bernuansa keagamaan, sekaligus gambaran kegigihan seorang perempuan untuk meraih keinginannya bebas dan melihat dunia luar seperti yang menjadi cita-citanya.

Annisa sebagai tokoh utama dalam film tersebut, diperankan oleh artis Revalina S. Temat, adalah perempuan yang mempunyai sikap yang memegang teguh prinsipnya. Seorang perempuan yang taat beragama, baik, pintar, namun mempunyai sifat keras kepala. Annisa adalah anak dari seorang kiai pemilik dan pengasuh pondok pesantren Al-Huda. Annisa juga perempuan yang selalu menghormati keputusan kedua orang tuanya, terkadang Annisa juga sering membantah keinginan ayahnya. Setelah Annisa lulus, Ia ingin sekolah di Yogyakarta tetapi ayahnya tidak setuju. Tetapi Annisa tetap memaksakan keinginannya. Malam harinya datang kerabat dari ayah Annisa, tujuannya untuk melamar Annisa sekaligus memberi sumbangan untuk pesantren Al-Huda. Meski Annisa tidak setuju dengan perjodohan itu, dengan terpaksa Annisa menuruti keinginan ayahnya dan akhirnya menikah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji film perempuan berkalung sorban dengan judul “Aspek Pendidikan Kesetaraan Gender, Analisis Isi dalam Perspektif PKn terhadap Film Perempuan Berkalung Sorban”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimanakah Aspek Pendidikan Kesetaraan Gender Pada Film Perempuan Berkalung Sorban?”. Secara lebih rinci permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut.

1. Konstruksi kesetaraan gender dalam memperoleh pendidikan pada Film Perempuan Berkalung Sorban.
2. Konstruksi kesetaraan peran dalam kehidupan rumah tangga pada Film Perempuan Berkalung Sorban.
3. Konstruksi kesetaraan gender dalam kehidupan keseharian masyarakat pada Film Perempuan Berkalung Sorban.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, sekaligus untuk memfokuskan pengumpulan dan analisis data, maka dirumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan konstruksi kesetaraan gender dalam memperoleh pendidikan pada film Perempuan Berkalung Sorban.
2. Untuk menggambarkan konstruksi kesetaraan peran dalam kehidupan rumah tangga pada film Perempuan Berkalung Sorban.
3. Untuk menggambarkan konstruksi kesetaraan gender dalam keseharian masyarakat pada film Perempuan Berkalung Sorban.

#### **D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian**

1. *Manfaat atau Kegunaan Teoritis*
  - a. Sebagai karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai konsep kesetaraan gender dalam film guna pembelajaran PKn.
  - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya, yang terkait dan relevan.
2. *Manfaat atau kegunaan praktis*
  - a. Memanfaatkan film sebagai media pembelajaran PKn.
  - b. Mendorong guru untuk kreatif dalam melaksanakan pembelajaran PKn, dengan memanfaatkan semua sarana pelaksanaan pembelajaran.
  - c. Menciptakan suasana pembelajaran PKn lebih menarik dan tidak membosankan bagi siswa.

#### **E. Daftar Istilah**

Penelitian ini mengenai aspek pendidikan kesetaraan gender, analisis isi dalam perspektif PKn terhadap film Perempuan Berkalung Sorban. Oleh karena itu, perlu dipertegas mengenai istilah-istilah sebagai berikut:

1. Pendidikan adalah “usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan” (Hasbullah, 2001: 2). Rumusan resmi dari UU Sisdiknas adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual



keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (pasal 1).

2. Gender. Perbedaan dan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan sehingga gender belum tentu sama di tempat yang berbeda, dan dapat berubah dari waktu ke waktu (Zaxshack, 2009).
3. Kesetaraan Gender. Suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia (Akhinayasrin, 2011).
4. Film adalah karya seni yang diproduksi secara kreatif dan memenuhi imajinasi orang yang bertujuan untuk memperoleh estetika (keindahan) yang sempurna, atau dirumuskan sebagai:

Film adalah selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan dibioskop), (KBBI, 2005:316).
5. Analisis Isi. Analisis adalah “penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya)” (KBBI, 2005:43). Jadi analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa (Yuris, 2009).
6. Perspektif adalah Kerangka kerja konseptual, sekumpulan asumsi, nilai, gagasan yang mempengaruhi perspektif manusia sehingga menghasilkan tindakan dalam suatu konteks situasi tertentu (Setiaman, 2008). Sedangkan “Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah pendidikan untuk memberi bekal,

pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara”. Jadi perspektif PKn adalah kerangka kerja konseptual, untuk melihat sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai PKn.